



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat  
Telp. (021) 29079176 Ext. 1521, Fax. (021) 29079201

---

Nomor : 76/DJU/HM02.3/1/2022  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Pengumuman Lomba Bagi Satuan Kerja  
Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2022

Jakarta, 11 Januari 2022

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi  
2. Ketua Pengadilan Negeri  
di  
Seluruh Indonesia

Guna meningkatkan kinerja satuan kerja di lingkungan peradilan umum dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat pencari keadilan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum akan menyelenggarakan beberapa lomba dalam rangka menyambut hari ulang tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-77. Adapun lomba yang akan dilaksanakan antara lain :

**1. Lomba PTSP**

- a. Tema yang diusung **“Meningkatkan Pelayanan Prima melalui Inovasi Layanan”**
- b. Waktu pelaksanaan : Bulan Maret 2022 s.d Akhir Tahun 2022
- c. Proses Pelaksanaan : berdasarkan usulan Pengadilan Tinggi
- d. Proses Penilaian Awal :

Pengusulan oleh PT yang dilengkapi data dukung :

- Video Profil Pengadilan terbaru dengan durasi maksimal 5 menit yang juga menggambarkan Layout PTSP, Sarana Prasarana PTSP, Jam layanan, Maklumat Pelayanan, Perangkat Survei, Sarana Prasarana Disabilitas, Petugas PTSP, Inovasi PTSP yang diunggulkan oleh Pengadilan.
- Dokumen Standar layanan
- Laporan bulanan hasil monev masing-masing penanggungjawab PTSP ke pejabat pengelola PTSP (6 bulan terakhir)
- SK Pengawas PTSP
- Laporan bulanan hasil pengawasan oleh Pengawas PTSP kepada Ketua Pengadilan (6 bulan terakhir)
- Hasil Survei dan tindak lanjut sepanjang Tahun 2021
- Komunikasi pelanggan (Instagram, Facebook) : Komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah
- Uraian inovasi layanan yang menguraikan alasan adanya inovasi dan tujuan serta manfaat inovasi

## **2. Penilaian Administrasi Perkara dan Keuangan Perkara**

### **a. Penilaian Administrasi Perkara**

Unsur yang dinilai pada penilaian Administrasi Perkara antara lain:

- 1) Pelaporan elektronik dilaporkan taat dan tepat waktu
- 2) SIPP : keakuratan, kelengkapan dan tepat waktu
- 3) Kesesuaian antara data pada SIPP dengan kondisi riil
- 4) Sinkronisasi SIPP
- 5) Pelaksanaan Delegasi
- 6) Pelaksanaan monev sesuai surat Dirjen Badilum Nomor 352/DJU/HM.02.3/3/2021 hal Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP
- 7) Penataan arsip berkas perkara dan kelengkapan sarana prasarana

### **b. Penilaian Keuangan Perkara**

Penilaian awal berdasarkan keakuratan data dan ketepatan waktu pada pelaporan elektronik serta keakuratan data pada Komdanas.

Unsur yang dinilai pada penilaian Keuangan Perkara antara lain:

- 1) Kesesuaian antara data pada komdanas dengan dokumen sumber
- 2) Kesesuaian antara data pada SIPP dengan berita acara penutupan kas
- 3) Pelaksanaan monev sesuai surat Dirjen Badilum Nomor 352/DJU/HM.02.3/3/2021 hal Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP
- 4) Kesesuaian pencatatan denda, subsidair dan data keuangan lainnya antara SIPP dan Putusan

## **3. Penilaian Keterbukaan Informasi Publik**

Unsur yang dinilai pada penilaian Keterbukaan Informasi Publik antara lain:

- a. Sudah ditetapkan struktur pelaksanaan pelayanan informasi yang di tandatangani oleh Ketua Pengadilan.
- b. Seluruh struktur pelaksanaan informasi memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing
- c. Sudah tersedia SOP Pemberian Layanan Informasi:
  1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala
  2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik
  3. Informasi yang dikecualikan
- d. Melaksanakan sosialisasi pemberian layanan informasi secara berkala pada eksternal dan internal
- e. Penerapan pelaksanaan pemberian informasi
- f. Laporan tahunan pelayanan informasi sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Layanan Informasi Di Pengadilan yang ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung dan ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian informasi minimal satu kali dalam satu tahun

## **4. Pemberian Penghargaan untuk Pelaksanaan Akreditasi Terbaik**

Kategori :

- a. Asesor PT terbaik, Kriteria Penilaian :
  - Menguasai proses asesmen dan cara penilaian
  - Pemahaman terhadap akreditasi
  - Diusulkan oleh PT (maksimal 2 orang per PT)

- b. PT terbaik, kriteria dan penilaian dilakukan oleh Ditjen Badilum
- c. PN terbaik dengan kriteria penilaian awal :
  - Nilai akreditasi terbaik
  - Sosialisasi APM PN yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri
  - Tingkat pemahaman pelaksanaan akreditasi pada struktur APM PN dan seluruh jajarannya
  - Pengelolaan dokumen akreditasi

#### **5. Pemilihan Role Model diantara pimpinan**

Untuk tingkat PN diusulkan oleh PT maksimal 3 orang pimpinan PN, dengan memperhatikan kriteria awal :

- a. Kepemimpinan
- b. Penghargaan yang diperoleh satker-satker dibawah kepemimpinan calon role model, baik dari eksternal maupun internal
- c. Responsif terhadap kebijakan lembaga (sosialisasi dan tindaklanjut)
- d. Inovatif
- e. Kerjasama dan koordinasi baik dengan pihak internal maupun eksternal

#### **6. Penilaian Pelaksanaan e-Litigasi**

##### **a. Pengadilan Negeri**

- 1) Nama Pengadilan Negeri yang diusulkan oleh Pengadilan Tinggi
- 2) Sosialisasi e-Litigasi dilaksanakan kepada para pihak internal dan eksternal
- 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik
- 4) Jumlah putusan yang dikeluarkan secara elektronik

##### **b. Hakim**

- 1) Nama Hakim yang diusulkan oleh Pengadilan Tinggi
- 2) Banyaknya putusan yang dikeluarkan secara elektronik
- 3) Banyaknya perkara yang disidangkan secara e-Litigasi
- 4) Verifikasi dokumen elektronik oleh Majelis Hakim

#### **7. Penilaian Pelaksanaan layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu**

##### **a. Posbakum**

- 1) Inovasi yang dilaksanakan POSBAKUM pada Pengadilan Negeri yang diusulkan
- 2) Publikasi dan sosialisasi
- 3) Proses seleksi OBH pada POSBAKUM
- 4) Pembinaan POSBAKUM oleh Panmud Hukum
- 5) Laporan dan Monev
- 6) Pemahaman petugas posbakum dan aparat pengadilan terkait (ketua, panitera, panmud)

b. Sidang diluar gedung pengadilan

- 1) Inovasi layanan hukum sidang diluar gedung pengadilan bagi masyarakat kurang mampu
- 2) Publikasi dan sosialisasi layanan hukum sidang diluar gedung pengadilan kepada pihak internal maupun eksternal pada Pengadilan Negeri yang diusulkan
- 3) Koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain
- 4) Perencanaan pelaksanaan dan penganggaran

c. Prodeo

- 1) Inovasi yang dilakukan oleh PN untuk optimalisasi layanan hukum prodeo bagi masyarakat kurang mampu
- 2) Publikasi dan sosialisasi ke pihak eksternal / masyarakat maupun internal selain melalui PTSP pada Pengadilan Negeri yang diusulkan
- 3) Penganggaran / Rencana anggaran
- 4) Pemahaman terkait pelaksanaan prodeo
- 5) Monitoring dan evaluasi

Pengusulan untuk satuan kerja yang diikuti sertakan dalam lomba harus melalui seleksi Pengadilan Tinggi terlebih dahulu dengan jumlah satuan kerja yang diusulkan sebagaimana tabel terlampir. Untuk lomba nomor 7 satuan kerja yang diusulkan adalah yang memiliki anggaran Posbakum, Sidang diluar gedung Pengadilan dan Prodeo. Pengusulan lomba dilakukan secara elektronik tanpa harus mengirimkan usulan manual melalui link sebagai berikut :

No	Usulan	Link	Keterangan
1.	Pengusulan Satuan Kerja oleh Pengadilan Tinggi	<a href="https://bit.ly/lomba_badilum_2022">bit.ly/lomba_badilum_2022</a>	Diinput oleh PT
2.	Pengiriman Data Dukung Lomba PTSP	<a href="https://bit.ly/ptsp_badilum_2022">bit.ly/ptsp_badilum_2022</a>	Diinput oleh PT
3.	Pengiriman Data Dukung Lomba Keterbukaan Informasi Publik	<a href="https://bit.ly/informasi_badilum_2022">bit.ly/informasi_badilum_2022</a>	Diinput oleh PT
4.	Pengiriman Data Dukung Lomba Layanan Hukum	<a href="https://bit.ly/lankum_badilum_2022">bit.ly/lankum_badilum_2022</a>	Diinput oleh PT
5.	Pengiriman Data Dukung Lomba Administrasi Perkara dan Keuangan Perkara	<a href="https://bit.ly/perkara_badilum_2022">bit.ly/perkara_badilum_2022</a>	Diinput oleh PT
6.	Pengiriman Data Dukung Lomba Pelaksanaan E-Litigasi	<a href="https://bit.ly/elitigasi_badilum_2022">bit.ly/elitigasi_badilum_2022</a>	Diinput oleh PT
7.	Pengiriman Data Dukung Lomba Pemilihan Role Model diantara Pimpinan	<a href="https://bit.ly/rolemodel_badilum_2022">bit.ly/rolemodel_badilum_2022</a>	Diinput oleh PT

Pengadilan Tinggi secara otomatis diikutsertakan dalam lomba tersebut diatas kecuali point 6 dan 7.

Batas waktu pengiriman usulan lomba tersebut diatas selambat-lambatnya sampai dengan tanggal **31 Maret 2022**.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PKA DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM



PRIM HARYADI

**TABEL USULAN LOMBA  
PER WILAYAH PENGADILAN TINGGI**

No	Pengadilan Tinggi	Kelas Pengadilan				Total Usulan
		I A Khusus	I A	I B	II	
1.	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	-	1	1	2	4
2.	Pengadilan Tinggi Medan	1	1	2	2	6
3.	Pengadilan Tinggi Padang	-	1	1	2	4
4.	Pengadilan Tinggi Pekanbaru	-	1	1	2	4
5.	Pengadilan Tinggi Jambi	-	1	1	2	4
6.	Pengadilan Tinggi Palembang	1	-	1	2	4
7.	Pengadilan Tinggi Bengkulu	-	1	1	2	4
8.	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	-	1	1	2	4
9.	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	-	-	1	2	3
10.	Pengadilan Tinggi Jakarta	5	-	-	-	5
11.	Pengadilan Tinggi Bandung	2	1	2	2	7
12.	Pengadilan Tinggi Semarang	2	1	2	2	7
13.	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	-	1	2	1	4
14.	Pengadilan Tinggi Surabaya	2	1	2	2	7
15.	Pengadilan Tinggi Banten	1	1	-	2	4
16.	Pengadilan Tinggi Denpasar	-	1	1	2	4
17.	Pengadilan Tinggi Mataram	-	1	1	2	4
18.	Pengadilan Tinggi Kupang	-	1	1	2	4
19.	Pengadilan Tinggi Pontianak	-	1	1	2	4
20.	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	-	1	1	2	4
21.	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	-	1	1	2	4
22.	Pengadilan Tinggi Samarinda	-	1	1	2	4
23.	Pengadilan Tinggi Manado	-	1	1	2	4
24.	Pengadilan Tinggi Palu	-	1	1	2	4
25.	Pengadilan Tinggi Makassar	1	1	2	2	6
26.	Pengadilan Tinggi Kendari	-	1	1	2	4
27.	Pengadilan Tinggi Gorontalo	-	-	1	2	3
28.	Pengadilan Tinggi Ambon	-	1	-	2	3
29.	Pengadilan Tinggi Maluku Utara	-	-	1	2	3
30.	Pengadilan Tinggi Jayapura	-	1	1	2	4
<b>Jumlah</b>		15	25	33	57	130